

## INTEGRITY #1

### ***Cawe-Cawe* Presiden dan Siasat PK Moeldoko**

Akhirnya, Presiden Jokowi terus terang mengakui. Beliau *cawe-cawe*, tidak akan netral, dalam Pilpres 2024. Bagaimana memahaminya?

Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Dalam Pilpres 2024, peran Beliau adalah wasit. Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua. Tidak boleh wasit mendukung Prabowo-Pranowo, sambil berusaha mendiskualifikasi Anies Baswedan. Presiden yang tidak netral, melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil.

*Cawe-cawe* Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko "mencopet" Partai Demokrat. Saya meminjam istilah "copet" dari Romahurmuziy PPP.

Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat *dikuyo-kuyo* Kepala Stafnya sendiri. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko.

Jokowi tidak bisa mengatakan "pencopetan" partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan.

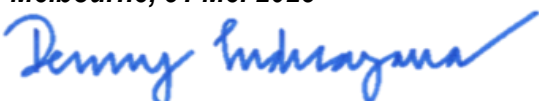
Apalagi ada informasi, konon, PK Moeldoko sudah diatur siasat menangnya. Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat, memenangkan PK Moeldoko di MA.

Secara teori, *cawe-cawe* Jokowi lewat tangan Moeldoko yang diduga mencopet Demokrat, adalah kejahatan yang mestinya membuka pintu pemecatan presiden. Di Amerika Serikat, Presiden Richard Nixon harus mundur untuk menghindari proses *impeachment*, karena skandal *watergate*. Yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap di masa kampanye.

Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko, berusaha "mencopet" Partai Demokrat. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partai Presiden Ke-6 SBY.

Rasa-rasanya, Ibu Megawati tidak mau partai politik didzalimi, sebagaimana di era Orde Baru PDI Mega *dikuyo-kuyo* PDI Soerjadi. Saatnya Petugas Partai Jokowi dihentikan *cawe-cawe* yang melanggar konstitusi.

**Melbourne, 31 Mei 2023**



**Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**